

Forum Yasinan (Pelayanan Setara Inklusif Andalan) Sebagai Model Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Sumbawa Barat

Yamara Moya Ghaury¹ Rispawati² Basariah³ Edi Kurniawansyah⁴

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: moyayamara@gmail.com¹ ripa64@gmail.com² basyariah@unram.ac.id³ edykurniawansyah@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Forum YASINAN (Pelayanan Setara Inklusif Andalan) sebagai model inovasi pelayanan publik berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumbawa Barat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses terbentuknya Forum YASINAN, mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dan terintegrasi dalam pelayanan publik, serta menganalisis dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi non-partisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pelaksana teknis, dan jamaah Forum YASINAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum YASINAN terbentuk sebagai respons terhadap permasalahan pelayanan publik yang mengubah pendekatan birokrasi formal menjadi lebih inklusif melalui integrasi nilai-nilai kearifan lokal. Forum ini mengintegrasikan lima nilai kearifan lokal utama yaitu gotong royong, budaya Basiru, musyawarah mufakat, silaturahmi, dan kesetaraan ke dalam sistem pelayanan publik. Penerapan Forum YASINAN terbukti berdampak positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat modal sosial, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Forum YASINAN juga berhasil mengubah sikap apatis masyarakat menjadi lebih partisipatif dan dapat dikonseptualisasikan sebagai manifestasi Citizens' Charter yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama dalam pelayanan publik. Inovasi ini telah mendapat pengakuan internasional dengan memenangkan juara pertama dalam World Innovation Spotlight Award Open Government Partnership (OGP) tahun 2021. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam sistem pelayanan publik dapat menciptakan model inovasi yang lebih responsif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Forum YASINAN, inovasi Pelayanan Publik, Kearifan Lokal, Partisipasi Masyarakat, Kabupaten Sumbawa Barat

Abstract

This research examines Forum YASINAN (Inclusive Prime Equal Service) as a model of public service innovation based on local wisdom in West Sumbawa Regency. The research aims to understand the formation process of Forum YASINAN, identify local wisdom values contained and integrated into public services, and analyze its impact on public service quality and community participation. This study employed a qualitative approach with data collection techniques including non-participant observation, semi-structured interviews, and documentation. Informants were determined through purposive sampling involving various stakeholders including local government officials, community leaders, technical implementers, and Forum YASINAN participants. The results show that Forum YASINAN was formed as a response to public service problems that transformed the formal bureaucratic approach into a more inclusive one through the integration of local wisdom values. The forum integrates five main local wisdom values: mutual cooperation (gotong royong), Basiru culture, deliberation for consensus (musyawarah mufakat), social relationships (silaturahmi), and equality into the public service system. The implementation of Forum YASINAN has proven to have positive impacts on improving public service quality, strengthening social capital, and encouraging active community participation in the planning, implementation, and evaluation processes of development programs. Forum YASINAN has also

successfully transformed the apathetic attitude of the community into a more participatory one and can be conceptualized as a manifestation of the Citizens' Charter that places citizens as the main focus in public services. This innovation has received international recognition by winning first place in the World Innovation Spotlight Award Open Government Partnership (OGP) in 2021. This research concludes that the integration of local wisdom into public service systems can create innovation models that are more responsive, accountable, and aligned with the needs of local communities.

Keywords: Forum YASINAN, public service innovation, local wisdom, community participation, West Sumbawa Regency



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya setiap manusia tidak bisa lepas dari sebuah pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan kebutuhan pelayanan manusia sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia. Menurut Monir dalam buku Pasolong (2011), mengatakan pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Dalam kehidupan bermasyarakat, pelayanan dikenal dengan istilah pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bersifat umum (Zaini, Efendi, & Tuswoyo, 2023) Pelayanan publik memiliki kaitan yang sangat erat dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan, tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, seperti memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, secara implisit menunjukkan pentingnya pemenuhan pelayanan publik oleh negara. Seiring dengan perkembangan dan peningkatan kebutuhan masyarakat, pemerintah semakin menyadari tanggung jawabnya untuk menyediakan pelayanan publik. Salah satu bukti komitmen pemerintah dalam hal ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Margareth, 2017) dijelaskan bahwa Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif, yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kata "barang, jasa dan pelayanan administratif" dalam bagian penjelasan dianggap sudah jelas, tetapi sebenarnya maksud "barang" bukanlah barang yang bisa diperdagangkan oleh manusia sehari-hari tetapi yang dimaksud adalah barang publik (*public goods*) yang penyediannya dilakukan oleh pemerintah.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, hal tersebut tentunya berdampak pada meningkatnya harapan masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, inovasi dalam pelayanan publik menjadi sebuah kewajiban. Melalui pelayanan dan inovasi yang berkualitas, masyarakat diharapkan dapat memberikan pendapat atau aspirasinya baik secara langsung maupun perwakilan kepada pemerintah. Hal ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung tugas-tugas aparatur pemerintah, sehingga tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara (Suandi, 2019). Dalam menentukan suatu ide yang memungkinkan dapat menjadikan inovasi akan mudah diterima oleh masyarakat, salah satu hal penting yang harus diperhatikan yaitu nilai-nilai lokal yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat atau sering disebut kearifan lokal. Berdasarkan pada Pasal 1 Ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kearifan Lokal dimaknai sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat (Ellitan, 2009). Integrasi kearifan lokal dalam sistem

pelayanan publik menjadikan suatu inovasi akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berperan dalam melestarikan warisan budaya daerah dan mencerminkan identitas masyarakat setempat.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, terdapat penjelasan tentang asas-asas pelayanan publik yang berhubungan dengan prinsip transparansi dan partisipasi. Kedua prinsip ini memiliki peranan penting dalam mewujudkan *good governance* serta mendukung kebijakan dan program pemerintah. Jika prinsip transparansi tidak diterapkan, masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam mengawasi pelayanan publik. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan kekacauan dalam penyelenggaraan negara. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan transparansi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tentang pentingnya keterbukaan publik untuk mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Keterbukaan publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara. Maka dari itu, publik berhak memperoleh informasi, salah satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan dan evaluasinya (Afrizal, 2019).

Di Indonesia, kualitas layanan publik masih belum optimal, baik dari sisi perumusan kebijakan maupun pelaksanaan regulasi. Rendahnya mutu layanan ini dipengaruhi oleh lemahnya kualitas kebijakan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Banyak persoalan krusial yang ditemui di lapangan, seperti perlakuan diskriminatif dalam pelayanan, ketidakjelasan biaya dan waktu penyelesaian layanan, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Berdasarkan data Ombudsman RI tahun 2015, tercatat 6.859 pengaduan masyarakat mengenai kinerja aparatur pemerintah. Terdapat sepuluh institusi yang paling banyak mendapat laporan, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, institusi pendidikan negeri, sektor perbankan, dan kejaksaan. Upaya mengoptimalkan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah bukanlah tugas sederhana, mengingat optimalisasi berkaitan dengan berbagai aspek yang telah mengakar dalam sistem birokrasi pemerintahan sejak lama, salah satunya adalah budaya birokrasi yang kurang mendukung. Isu fundamental dalam pelayanan publik berkaitan erat dengan peningkatan kualitas layanan. Kualitas pelayanan sangat bergantung pada beberapa faktor kunci, meliputi sistem penyelenggaraan, kapabilitas SDM, struktur kelembagaan, dan kejelasan konsep pelayanan.

Pandangan masyarakat terkait pelayanan publik di Indonesia sangat rumit dan berbelit-belit karena sistem birokrasi di Indonesia cenderung mempersulit proses pelayanan. Dalam pemberian layanan publik, sering terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum birokrat, di mana sebagian dari mereka menjadikan pelayanan publik sebagai sumber penghasilan tambahan dengan meminta imbalan dari masyarakat yang menginginkan pengurusan dokumen yang lebih cepat (Husain, 2019). Di Kabupaten Sumbawa Barat, penyampaian aspirasi dan pengaduan oleh masyarakat menggunakan model seperti kotak saran, call center, aplikasi pengaduan dan lain-lain (Fahriza & Pertama, 2021). Namun, seringkali masyarakat lebih memilih untuk menyampaikan keluhan secara online melalui media sosial, meskipun terdapat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES), atau Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (MUSRENBANGKAB), model yang digunakan masih terbilang tidak efektif dengan rendahnya partisipasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah berhasil membangun sebuah model inovasi baru yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem pelayanan publik. Bentuk inovasi yang dilakukan yaitu dengan mengintegrasikan salah satu kearifan lokal yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia yakni yasinan. Yasinan

merupakan kegiatan membaca surah yasin secara bersama-sama yang dilakukan pada setiap malam Jumat atau pada acara-acara tertentu. Dalam lingkungan birokrasi di Kabupaten Sumbawa Barat, kegiatan yasinan dipadukan dengan sebuah forum yang pada pelaksanaannya terdapat musyawarah mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan berbasis masyarakat. Program tersebut dinamakan Forum YASINAN (Pelayanan Setara Inklusif Andalan) yang dimana merupakan bagian dari program unggulan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Program pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ini telah berhasil mematahkan konsep demokrasi liberal yang kaku dan menghadirkan sebuah model demokrasi asli Indonesia di tingkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pertunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong kegiatan Forum YASINAN telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Dalam Forum YASINAN, masyarakat dapat memberikan keluhan secara langsung dan mendapatkan tanggapan secara *real-time* dari pejabat yang berkaitan dengan keluhan yang diadakan. Setiap keputusan didiskusikan secara terbuka oleh masyarakat dan pimpinan daerah beserta jajaran birokrasi pemerintah. Hal ini memberikan adanya kepercayaan masyarakat atas hadirnya pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat dan masyarakat dapat secara langsung mendengarkan laporan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat serta turut mengawal solusi yang akan dilaksanakan. Tak hanya itu, keputusan yang disepakati didasari atas kesepakatan dan kepentingan bersama sehingga dapat dipercaya oleh publik (Mustofa, Halikin, & Akhairuddin, 2020). Pada tahun 2021 Forum YASINAN berhasil mendapatkan juara pertama dalam ajang *World Innovation Spotlight Award Open Government Partnership* (OGP) di Korea, dan berhasil mengalahkan inovasi dari berbagai negara yang ada di Benua Asia Pasifik dan kini bergabung dengan juara dari Kolombia, Nigeria, dan Ukraina (Fahriza & Pertama, 2021). Penghargaan bergengsi yang diraih menunjukkan keberhasilan Kabupaten Sumbawa Barat dalam melakukan inovasi yang efektif untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan hasil dari studi pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mudahnya kesempatan warga untuk menyampaikan langsung aspirasinya, termasuk memberikan kritik dan penilaian kinerja secara terbuka kepada Bupati dan atau Wakil Bupati, beserta jajaran birokrasi yang hadir. Hal ini menjadi salah satu keistimewaan dalam kegiatan tersebut. Forum YASINAN di Kabupaten Sumbawa Barat hadir sebagai model inovatif pelayanan publik yang menarik untuk diteliti karena keberhasilan inovasi dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, Forum YASINAN juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pembangunan sistem pemerintahan daerah. Keunikan Forum YASINAN sebagai objek penelitian yang sangat menarik untuk diteliti terletak pada integrasi yang sangat baik antara kearifan lokal dan inovasi pemerintahan modern. Konsep pertemuan pada malam jumat yang dimana waktu tersebut telah menjadi kebiasaan dan budaya masyarakat setempat, serta menggabungkannya dengan teknologi *live streaming*, Forum YASINAN dapat menciptakan model pelayan publik yang inovatif dan kontekstual. Forum YASINAN menghasikan dampak sosial dan pembangunan seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia, menjadikan pendekatan ini menarik untuk diteliti dari prespektif keberhasilan atas penerapan kebijakan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Forum YASINAN (Pelayanan Setara Inklusif Andalan) Sebagai Model Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Sumbawa Barat”. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana proses terbentuknya Forum YASINAN Sebagai Model Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Sumbawa Barat? Apa saja nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Forum YASINAN dan integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam pelayanan publik? Bagaimana dampak penerapan Forum YASINAN terhadap kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat? Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian Forum Yasinan sebagai model inovasi pelayanan publik berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumbawa Barat adalah untuk mengetahui: Mengetahui proses terbentuknya Forum YASINAN Sebagai Model Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Sumbawa Barat. Mengetahui nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Forum YASINAN dan integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam pelayanan publik. Mengetahui dampak penerapan Forum YASINAN terhadap kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan diantaranya:

1. Penelitian Wahyudi (2024) yang berjudul “Democratic Innovation from West Sumbawa Regency, Indonesia: Analysis of Forum YASINAN as an Instrument of Community Participation in Development”. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Forum YASINAN merupakan terobosan inovatif dari aktor politik di Tingkat daerah. Hal tersebut memberikan bukti bahwa demokrasi informal mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dipraktikkan di Kabupaten Sumbawa Barat. Komunikasi yang cenderung kaku dan formal melalui forum resmi di pemerintahan dapat dialihkan ke ruang pertemuan informal, di mana masalah publik sehari-hari dapat diselesaikan. Hal menarik dari penelitian ini adalah masalah publik tidak harus diselesaikan dalam kerangka birokrasi yang kaku dan formal. Dalam praktiknya di Kabupaten Sumbawa Barat, demokrasi informal yang mendalam dapat menjadi alternatif penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan sekarang adalah bahwa kedua penelitian sama-sama meneliti tentang inovasi pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa Barat. Kedua penelitian juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam inovasi pelayanan publik tersebut. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian yakni berfokus pada inovasi demokrasi informal melalui Forum YASINAN, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada inovasi pelayanan publik melalui Forum Yasinan. Selain itu, penelitian yang diuraikan hanya dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat, sementara penelitian yang akan dilakukan juga akan mempertimbangkan kemungkinan penerapan di daerah lain.
2. Penelitian Gonda, Bahfiarti, dan Farid (2023) yang berjudul “Implementasi Komunikasi Organisasi Berbasis Kearifan Lokal Dalam Pelayanan Publik”. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi komunikasi organisasi berbasis kearifan lokal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Banggai Laut telah berhasil membentuk budaya organisasi yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan publik. Terdapat empat nilai kearifan lokal yang diintegrasikan, yaitu *moloyos* (kejujuran dan ketulusan), *moliios* (kebersihan hati nurani), *maamis* (senyuman dan keramahan), dan *monondok* (komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik). Meskipun nilai-nilai ini telah

diterapkan, pemahaman terhadap kearifan lokal (4M) masih perlu ditingkatkan, karena sosialisasi yang dilakukan melalui apel, rapat, dan obrolan santai belum sepenuhnya efektif. Namun, hasilnya terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat yang selalu berada pada level baik, menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya internalisasi nilai-nilai kearifan lokal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan budaya organisasi di DPMPTSP Kabupaten Banggai Laut. Persamaan dari penelitian ini yakni keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat. Integrasi nilai-nilai kearifan lokal menjadi dasar dalam menciptakan sistem pelayanan yang relevan dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, kedua model ini berfokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan, serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Meskipun terdapat persamaan, terdapat juga perbedaan yang signifikan antara keduanya. Pertama, metode sosialisasi yang digunakan berbeda; DPMPTSP mengandalkan apel pagi, rapat, dan obrolan santai, yang dianggap kurang efektif, sedangkan Forum Yasinan memanfaatkan pertemuan rutin berbasis budaya yang lebih interaktif. Kedua, DPMPTSP menciptakan komunikasi yang bersifat vertikal dan horizontal, sementara Forum YASINAN membuka dialog terbuka untuk partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Dari segi hasil, DPMPTSP menunjukkan kepuasan masyarakat yang baik melalui laporan survei, sementara Forum YASINAN meraih penghargaan internasional, menandakan keberhasilan inovasi dalam pelayanan. Implementasi di DPMPTSP Kabupaten Banggai Laut maupun Forum YASINAN di Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi dasar yang kuat untuk meningkatkan pelayanan publik. Namun, metode yang digunakan dan konteks budaya masing-masing daerah memberikan warna yang berbeda dalam pelaksanaan dan hasilnya.

3. Penelitian Sumanda (2017) yang berjudul "Peranan Kearifan Lokal Bali Dalam Prespektif Kebijakan Publik". Kesimpulan dari penelitian ini adalah *local wisdom* memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Melalui integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan, seperti yang tercermin dalam falsafah Tri Hita Karana di Bali, dapat tercipta keharmonisan antara masyarakat dan pemerintah. Dukungan dari semua lapisan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga moral, etika, dan nilai-nilai lokal, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konsep *good governance*. Kebijakan publik perlu disesuaikan dengan kebiasaan lokal agar dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik. Persamaan dari *local wisdom* di Bali maupun Forum YASINAN di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu mengedepankan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam pelayanan publik. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, keduanya menekankan pentingnya dukungan dari masyarakat untuk menjaga moral dan etika dalam implementasi kebijakan publik. Namun terdapat perbedaan dalam kedua penelitian ini diantaranya yaitu *local wisdom* di Bali seperti yang tercermin dalam Awig-awig Desa Pakraman, menunjukkan bagaimana regulasi lokal dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan nasional, contohnya dalam penerapan aturan lalu lintas. Di sisi lain, Forum YASINAN mengimplementasikan tradisi yasinan sebagai sarana dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah, yang memunculkan adanya partisipasi langsung dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Sementara *local wisdom* lebih berfokus pada penghindaran benturan antara kebijakan pusat dan nilai-nilai lokal, Forum YASINAN lebih menekankan pada inovasi dalam komunikasi dan transparansi dalam pelayanan public.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Jenis penelitian studi kasus dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, aktivitas, atau proses dalam konteks kehidupan nyata. Creswell menyatakan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait konteks sosial dan budaya dari subjek penelitian. Melalui pendekatan kualitatif dan jenis studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang holistik dan kontekstual mengenai inovasi pelayanan publik berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sumbawa Barat (Rusandi & Rusli, 2021). Kabupaten Sumbawa Barat merupakan sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Secara geografis, Kabupaten Sumbawa Barat terletak di antara 116°42' BT – 117°05' BT dan 08°08' LS – 09°07' LS. Kabupaten Sumbawa Barat terletak di bagian barat Pulau Sumbawa, berbatasan dengan Laut Flores di utara, Kabupaten Sumbawa di timur, Samudra Hindia di selatan serta Selat Alas di barat. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki luas wilayah sebesar 1.849,02 km². Terdiri dari 8 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 65 Desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Taliwang dengan luas wilayah 375,93 km² dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Maluk dengan luas wilayah 92,42 km². Sumbawa Barat merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa pada tanggal 18 Desember 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003. Berdasarkan data proyeksi penduduk kabupaten/kota hasil sensus penduduk 2020 terdapat sekitar 2,75 persen penduduk NTB tinggal di Sumbawa Barat dengan luas wilayah 1.742,27 km². Pada tahun 2024, kepadatan penduduk Sumbawa Barat mencapai 89 jiwa/km². Dari tahun ke tahun trennya menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Selama periode 2022-2024, kepadatan penduduk Sumbawa Barat mengalami penambahan sebesar 3 jiwa/km². Kabupaten Sumbawa Barat merupakan Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah yang telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem pelayanan publik melalui Forum YASINAN. Selain itu, dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, Kabupaten Sumbawa Barat memiliki potensi untuk mengelola sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara lebih terfokus dan efisien. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menjadikan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai salah satu objek penelitian. Jadwal kegiatan penelitian terkait Forum YASINAN (Pelayanan Setara Inklusif Andalan) Sebagai Model Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Sumbawa Barat dimulai pada Oktober 2024. Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan informan (Moleong, 2017).

Data lainnya yaitu dokumentasi kegiatan atau peristiwa berupa foto masyarakat, birokrasi dan lain sebagainya yang sedang melakukan kegiatan forum yasinan serta foto-foto pemerintah kabupaten sumbawa barat yang telah mendapatkan penghargaan di tingkat internasional maupun nasional terkait Forum YASINAN. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait situasi dan kondisi latar penelitian (Murdiyanto, 2020). Berdasarkan jenis data yang digunakan, peneliti telah mengidentifikasi informan atau sumber informasi dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* (pengambilan data berdasarkan tujuan). Melalui teknik *purposive sampling* peneliti akan dengan mudah menentukan siapa yang akan dijadikan sebagai informan dan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun beberapa kriteria dalam penentuan informan sebagai berikut:

1. Pihak yang menginisiasi kegiatan Forum YASINAN dan memiliki kewenangan resmi dalam pemerintahan daerah.
2. Pihak yang berperan langsung dalam operasional kegiatan (Pelaksana teknis Forum YASINAN).

3. Tokoh Masyarakat yang terlibat dalam pengembangan Forum YASINAN.
4. Fasilitator yang mengumpulkan informasi dan aspirasi masyarakat.
5. Pihak yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan atau keluhan masyarakat.
6. Jamaah Forum YASINAN yang memiliki tingkat partisipasi dan kehadiran paling tinggi dalam kegiatan Forum Yasinan.

Berdasarkan kriteria tersebut, pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tokoh masyarakat, Agen gotong royong, Perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat dan Kepala Sub Bagian Keuangan DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat dan Jamaah Forum YASINAN. Informan yang dipilih peneliti merupakan informan yang memiliki keterkaitan, kewenangan, dan berkontribusi dalam Forum YASINAN. Pihak yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode agar diperoleh data yang lengkap. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan yang sistematis terhadap objek penelitian yang meliputi seluruh alat indra, termasuk penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Melalui observasi, peneliti dapat melakukan pengamatan terkait fenomena secara langsung sehingga memperoleh informasi yang akurat (Moleong, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipan di mana peneliti tidak terlibat langsung melainkan hanya sebagai pengamat independen. Observasi non-partisipan ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Forum YASINAN dan integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam pelayanan publik.
2. Wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dan responden. Alat yang digunakan dalam wawancara disebut pedoman wawancara. Alat ini berfungsi untuk membantu pewawancara dalam membatasi aspek-aspek yang perlu dibahas (Handayani, 2020). Adapun tiga jenis wawancara diantaranya yaitu, wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, namun yang peneliti gunakan dalam wawancara ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang digunakan peneliti sebagai acuan, tetapi tidak mengikat pewawancara untuk mengajukan pertanyaan secara kaku. Pewawancara dapat menyesuaikan urutan, formulasi, atau penambahan pertanyaan sesuai dengan situasi dan respons narasumber. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara semi terstruktur biasanya bersifat terbuka, yaitu memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjawab sesuai dengan pemahaman dan pengalaman mereka. Teknik wawancara semi terstruktur dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang proses terbentuknya Forum YASINAN sebagai model inovasi pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa Barat, nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Forum YASINAN, integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam pelayanan publik, dampak penerapan Forum YASINAN terhadap kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan-catatan, transkrip, agenda, buku, majalah, prasasti, notulen, rapat, dan sebagainya (Fadli, 2021). Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti sebagai teknik pengumpulan data pelengkap dari teknik observasi dan teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang proses terbentuknya Forum YASINAN sebagai model inovasi pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa Barat, nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Forum YASINAN, integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam pelayanan publik, dampak penerapan Forum YASINAN terhadap kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Terbentuknya Forum YASINAN Sebagai Model Inovasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Sumbawa Barat

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian, dapat dicermati bahwa Forum YASINAN (Pelayanan Setara Inklusif Andalan) di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan inovasi pelayanan publik yang lahir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan pelayanan yang dihadapi masyarakat. Mulgan & Albury (2008) mendefinisikan inovasi sebagai kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru yang menghasilkan peningkatan efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil yang signifikan (Ariyani et al., 2016). Sejalan dengan konsep tersebut, Muluk (2008) memperkuat definisi inovasi dalam pelayanan publik yakni sebagai perubahan yang terencana dengan memperkenalkan teknologi, pasar baru, material baru dan kombinasi baru dari faktor-faktor produksi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan. Perspektif Muluk ini menekankan bahwa inovasi tidak hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga tentang bagaimana mengkombinasikan sumber daya yang ada dengan cara baru untuk menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Forum YASINAN merupakan perwujudan dari kedua konsep inovasi tersebut, di mana inovasi tidak hanya berfokus pada teknologi baru tetapi juga pada perubahan sistem, proses, dan pendekatan pelayanan untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi masyarakat, sekaligus memanfaatkan kombinasi baru dari sumber daya yang telah ada. Proses terbentuknya Forum YASINAN dilatarbelakangi oleh beberapa faktor krusial yang dapat dianalisis sebagai berikut, yaitu permasalahan pelayanan publik, strategi inovasi pelayanan publik, dan karakteristik inovasi pelayanan publik. Berdasarkan hasil temuan penelitian dengan informan penelitian di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebagai berikut:

Permasalahan Pelayanan Publik di Kabupaten Sumbawa Barat

Terbentuknya Forum YASINAN tidak terlepas dari berbagai masalah pelayanan publik yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan utama pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa Barat sebelum adanya Forum YASINAN yaitu sebagai berikut:

1. Pola Pelayanan Yang Tidak Efektif. Masyarakat dihadapkan pada pola pelayanan yang tidak efektif yang menyebabkan kesulitan dalam menyalurkan aspirasi dan keluhan. Instrumen-instrumen pelayanan seperti kotak saran yang terpasang di berbagai kantor dinas nyatanya jarang tersentuh, bahkan cenderung terabaikan tanpa adanya mekanisme pemeriksaan berkala dan jaminan tindak lanjut. Demikian pula dengan layanan *call center* 24 jam yang pernah diimplementasikan namun mengalami berbagai bentuk penyalahgunaan sehingga tidak mencapai tujuan utamanya sebagai saluran komunikasi yang efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi teknologi dan metode pelayanan

sebagaimana yang dikemukakan oleh Muluk (2008) terkait pentingnya kombinasi yang tepat dari faktor-faktor produksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Lambatnya Respon Pemerintah. Lambatnya respons aparat pemerintah terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan, masyarakat seringkali berada dalam kebingungan tentang kepada siapa seharusnya melaporkan permasalahan infrastruktur seperti jalan rusak atau fasilitas umum yang tidak berfungsi dengan baik. Bahkan ketika berhasil menyampaikan laporannya, tidak ada transparansi mengenai kapan dan bagaimana laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Ketidakpastian inilah yang kemudian menumbuhkan apatisme di kalangan masyarakat terhadap mekanisme formal yang tersedia.
3. Akses Pelayanan Formal yang Terbatas. Akses terhadap pelayanan formal terbukti masih menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat yang bermukim di wilayah-wilayah terpencil. Kesenjangan pelayanan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan menciptakan disparitas yang mengkhawatirkan, di mana masyarakat pedesaan seringkali harus menempuh jarak jauh dan waktu lama untuk mendapatkan pelayanan dasar yang sama kualitasnya dengan yang dinikmati oleh masyarakat perkotaan. Keterbatasan akses ini pada gilirannya menciptakan kesenjangan informasi dan partisipasi dalam proses pembangunan daerah. Permasalahan ini menunjukkan perlunya perubahan terencana dalam pendekatan pelayanan publik sebagaimana ditekankan oleh kedua teori, yang tidak hanya menyangkut inovasi teknologi tetapi juga inovasi dalam metode distribusi pelayanan.
4. Kurangnya Partisipasi dan Keterbukaan Masyarakat. Rendahnya tingkat partisipasi dan keterbukaan masyarakat menjadi hambatan tersendiri dalam upaya optimalisasi pelayanan publik. Ketiadaan mekanisme yang efektif untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat menyebabkan pemerintah kesulitan mendapatkan masukan konstruktif dan dukungan kolaboratif dalam implementasi program-program pembangunan. Sebagaimana dituturkan oleh salah satu informan, tanpa adanya keterbukaan, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat di lapangan menjadi sulit diwujudkan, sehingga menghambat tercapainya tujuan bersama dalam membangun daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan "pasar baru" dalam konteks pelayanan publik sebagaimana diusulkan oleh Muluk (2008), dimana partisipasi masyarakat dipandang sebagai sumber nilai dalam proses inovasi.

Strategi Inovasi yang Diterapkan dalam Forum YASINAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Forum YASINAN di Kabupaten Sumbawa Barat mengimplementasikan berbagai strategi inovatif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mengacu pada teori inovasi yang dikemukakan oleh Mulgan & Albury bahwa inovasi merupakan kreasi dan implementasi proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru yang menghasilkan peningkatan efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil yang signifikan (Ariyani et al., 2016). Penelitian ini menemukan bahwa Forum YASINAN telah menerapkan lima strategi inovasi utama yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Transformasi Pendekatan Birokrasi Formal menjadi Pelayanan Berbasis Nilai Lokal. Forum YASINAN telah berhasil melakukan transformasi pendekatan birokrasi yang formal menjadi pendekatan pelayanan yang berbasis nilai lokal. Hal ini ditandai dengan dihilangkannya sekat-sekat protokoler yang selama ini menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Dalam forum ini, Bupati tidak lagi menggunakan atribut keprotokolernya melainkan hadir sebagai bagian dari masyarakat, duduk bersama, dan mendengarkan langsung keluhan warga. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa Barat. Integrasi nilai-nilai religius dan kearifan lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat setempat, seperti tradisi

sholat bersama, pembacaan yasin, dan silaturahmi pada malam Jumat. Pemindahan *setting* interaksi dari ruang formal yang kaku ke dalam ruang keagamaan yang lebih santai telah menciptakan suasana yang kondusif bagi keterbukaan dan diskusi konstruktif.

2. Integrasi Sistem Pengaduan dengan Sistem Perencanaan dan Evaluasi. Forum YASINAN tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengaduan, tetapi juga terintegrasi dengan sistem perencanaan dan evaluasi. Pengaduan masyarakat diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensinya. Pengaduan yang bersifat mendesak dan berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar jika ditunda akan segera ditanggapi, sementara pengaduan yang kurang mendesak akan disalurkan melalui mekanisme MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Sinkronisasi dengan siklus anggaran memungkinkan eksekusi yang fleksibel, baik dilakukan saat itu juga, keesokan harinya, atau disesuaikan dengan tahun anggaran. Kehadiran semua kepala dinas terkait dalam forum ini menciptakan jejaring koordinasi lintas sektor yang memungkinkan pengaduan langsung ditanggapi oleh pihak yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk menyelesaikannya.
3. Desentralisasi Pelayanan melalui Agen Gotong Royong. Desentralisasi pelayanan melalui pembentukan Agen Gotong Royong (AGR) merupakan strategi yang diterapkan dalam Forum YASINAN. Agen Gotong Royong selanjutnya disingkat AGR, adalah warga masyarakat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang direkrut oleh Pemerintah daerah untuk melaksanakan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kriteria yang menjadi syarat Agen Gotong Royong yaitu pendidikan minimal SMP, kemampuan bersosialisasi dengan baik, dan batasan usia maksimal 59 tahun. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa per 31 Desember 2023, terdapat 684 AGR yang tersebar di 8 kecamatan dan 228 lingkungan atau peliuk (unit terkecil dalam struktur pemerintahan desa) di Kabupaten Sumbawa Barat. AGR berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat di tingkat akar rumput dengan pemerintah. Masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok merasakan manfaat langsung dari keberadaan AGR, karena mereka secara rutin melakukan kunjungan dan menggali permasalahan yang dihadapi untuk kemudian disampaikan dalam Forum YASINAN. Pembagian peran AGR sebagai agen pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan yang bertugas di tingkat lingkungan atau peliuk memungkinkan penyerapan aspirasi yang lebih komprehensif.
4. Penguatan Kapasitas Masyarakat melalui Edukasi Terintegrasi. Forum YASINAN tidak hanya menjadi tempat pengaduan, tetapi juga wadah pembelajaran kolektif melalui berbagi pengalaman, ceramah edukatif, dan diskusi mengenai berbagai isu pembangunan. Komponen edukasi yang melekat dalam Forum YASINAN berperan penting dalam membangun pemahaman kolektif tentang proses pembangunan daerah, sehingga meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dari sekadar partisipasi simbolik menjadi partisipasi substantif yang berlandaskan pemahaman yang mendalam.
5. Implementasi Sistem Penanganan Pengaduan yang Responsif. Implementasi sistem penanganan pengaduan yang responsif menjadi strategi yang melengkapi keseluruhan rangkaian inovasi dalam Forum YASINAN. Kehadiran semua pemangku kepentingan dalam forum memungkinkan pengaduan langsung ditanggapi saat itu juga, mempercepat proses pengambilan keputusan untuk permasalahan mendesak tanpa terjebak dalam birokrasi yang panjang dan berbelit. Efektivitas sistem ini terlihat dari realisasi program yang cepat dan tepat sasaran berdasarkan pengaduan masyarakat, sehingga menciptakan hubungan sebab akibat yang jelas antara pengaduan dan tindakan perbaikan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Karakteristik Inovasi Forum YASINAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Forum YASINAN menampilkan sejumlah karakteristik yang membedakannya dari model pelayanan publik konvensional diantaranya sebagai berikut:

1. Kebaruan (*Novelty*). Nilai-nilai religius berhasil diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan publik secara harmonis. Integrasi ini tidak bersifat artifisial atau superfisial, melainkan asli dan substansial sehingga menghasilkan model pelayanan yang autentik dan kontekstual. Penghapusan sekat birokrasi yang menciptakan interaksi yang lebih egaliter antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi penanda kebaruan yang efektif. Melalui pendekatan ini, Forum YASINAN tidak sekadar memodifikasi sistem yang ada tetapi menciptakan paradigma baru dalam pelayanan publik yang berorientasi pada kesetaraan. Hal ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan nilai publik.
2. Kesetaraan dan Inklusifitas (*Gender Equality and Inclusive language*). Penghapusan hierarki sosial dalam forum ini memungkinkan semua warga, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, untuk menyuarakan aspirasi dan keluhannya dengan bebas. Inklusivitas lintas status sosial ini menjadi landasan bagi terwujudnya egalitarianisme dalam setting informal, di mana tidak ada lagi perbedaan antara pejabat dan warga biasa. Sebagaimana penuturan oleh salah satu narasumber, dalam Forum YASINAN tidak ada perbedaan diantara kita, semua menyatu dalam satu kesatuan, apa yang dimakan pak bupati malam itu ya warga bisa sama makannya. Pernyataan ini mengindikasikan pergeseran radikal dari model pelayanan hierarkis menjadi model pelayanan yang lebih humanis dan setara. Hal ini menekankan pentingnya perlakuan yang setara terhadap semua warga dalam pelayanan publik.
3. Efektivitas (*Effectiveness*). Menurut teori inovasi Mulgan & Albury (2008), kecepatan respons terhadap pengaduan masyarakat, ketepatan solusi yang diberikan, dan realisasi program yang tepat sasaran merupakan bentuk nyata dari peningkatan efektivitas pelayanan publik yang menjadi salah satu dimensi penting. Efektivitas ini tidak hanya memberi kepuasan sesaat pada masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang terhadap komitmen pemerintah dalam merespons kebutuhan warganya, sebuah modal sosial yang sangat berharga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Hal ini menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan respons sebagai indikator kualitas pelayanan publik.
4. Kebermanfaatannya (*Usefulness*). Penghematan anggaran yang signifikan, seperti yang terjadi dalam program sanitasi total berbasis masyarakat yang berhasil menghemat anggaran 11-12 milyar per tahun, merupakan bukti empiris keberhasilan forum ini dalam menciptakan efisiensi fiskal. Peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran juga menjadi bukti kebermanfaatannya nyata lainnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dampak positif yang terukur ini menegaskan bahwa Forum YASINAN bukan sekadar forum diskusi tanpa hasil konkret, melainkan wadah transformatif yang menghasilkan perubahan nyata dalam pembangunan daerah. Hal ini menekankan pentingnya penciptaan nilai publik sebagai tujuan utama inovasi pelayanan publik.
5. Direplikasi (*Transferability*). Forum YASINAN sebagai inovasi pelayanan publik memiliki nilai universal di tengah keunikan kontekstualnya. Adanya pengakuan dan potensi replikasi sebagai validasi inovasi yakni pengakuan internasional yang diterima Forum YASINAN, seperti penghargaan yang diterima pada tanggal 15 Desember 2021 sebagai juara pertama *World Innovation Spotlight Award OGP (Open Government Partnership) 2021* di Korea. Selanjutnya pada 6-7 september 2023 Bupati Kabupaten Sumbawa Barat mengikuti KTT

OGP Global Summit 2023 di Tallinn, Estonia. Kegiatan ini akan dihadiri sebanyak 76 negara dengan lebih dari 2.000 delegasi dan tamu undangan, termasuk Bupati Kabupaten Sumbawa Barat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berhasil menjadi tamu undangan pada acara skala internasional itu karena sebelumnya telah berhasil membawa KSB sebagai salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan prinsip pemerintahan terbuka dan memenuhi seluruh komitmen yang menjadi tujuan forum sebagai syarat masuk dalam forum OGP Lokal (Indonesia/Asia). Pada tanggal 5-7 Februari 2025 Kabupaten Sumbawa Barat diundang kembali untuk hadir dalam *Regional Meeting Open Government Partnership* di Manila, Philippina. Acara tersebut mempertemukan para reformis pemerintah, para pemimpin masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan dari seluruh Asia dan Pasifik, bersama dengan mitra global dan regional, untuk membahas kemajuan inisiatif pemerintah yang terbuka dan mengeksplorasi cara-cara untuk mengatasi isu-isu paling kritis. Pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa model pelayanan yang berbasis kearifan lokal ini memiliki nilai yang diakui secara internasional. Sebagaimana didefinisikan dalam teori inovasi Mulgan & Albury bahwa potensi replikasi di daerah lain semakin menegaskan bahwa Forum YASINAN telah berhasil mencapai peningkatan efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil yang signifikan (Ariyani et al., 2016). Hal ini menekankan pentingnya replikasi sebagai indikator keberhasilan suatu inovasi.

Nilai-nilai Kearifan Lokal yang Terkandung Dalam Forum YASINAN dan Integrasi Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pelayanan Publik

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian, dapat dicermati bahwa kearifan lokal dalam Forum YASINAN (Pelayanan Setara Inklusif Andalan) dimanifestasikan dalam berbagai dimensi yang saling terkait dan terintegrasi dalam satu kesatuan sistem pelayanan publik yang inklusif. Menurut Njatrijani (2018), kearifan lokal adalah pandangan hidup, pengetahuan, dan strategi hidup yang didasarkan pada cita-cita kebaikan. Kearifan lokal dapat diwujudkan dalam tindakan-tindakan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, nilai-nilai kearifan lokal yang ditemukan dalam Forum YASINAN menunjukkan keselarasan dengan dimensi-dimensi kearifan lokal yang meliputi pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, mekanisme pengambilan keputusan lokal, dan solidaritas kelompok lokal. Forum YASINAN berhasil mengintegrasikan semua dimensi ini untuk menciptakan model pelayanan publik yang berakar pada kearifan lokal masyarakat Sumbawa Barat. Dimensi pengetahuan lokal tercermin dalam pemahaman bersama tentang makna yasinan dan budaya *Basiru* yang menjadi fondasi forum. Dimensi nilai lokal terwujud melalui gotong royong, silaturahmi, dan kesetaraan yang menjadi prinsip operasional forum. Dimensi keterampilan lokal terlihat dari kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan forum sebagai sarana penyampaian aspirasi secara musyawarah. Dimensi sumber daya lokal tampak dalam pemanfaatan makanan tradisional sebagai media perekat sosial. Dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal terartikulasi melalui musyawarah mufakat yang menjadi metode penyelesaian masalah. Sementara dimensi solidaritas kelompok lokal termanifestasi dalam kebersamaan dan rasa memiliki terhadap program-program pembangunan yang dihasilkan melalui Forum YASINAN. Keberhasilan Forum YASINAN dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam pelayanan publik menunjukkan bahwa terdapat potensi besar untuk merevitalisasi dan mengkontekstualisasikan kearifan lokal dalam menjawab tantangan tata kelola pemerintahan kontemporer. Hal ini sejalan dengan pandangan Njatrijani (2018) bahwa kearifan lokal merupakan strategi hidup yang dapat diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks pelayanan publik. Berdasarkan hasil temuan penelitian dengan informan penelitian di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut:

Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Forum YASINAN

1. Nilai Gotong Royong atau Budaya "*Basiru*". Nilai gotong royong muncul sebagai nilai dasar yang melandasi keberadaan Forum YASINAN di Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan penuturan informan, nilai gotong royong menjadi elemen kearifan lokal yang secara sengaja diintegrasikan ke dalam forum ini. Hal ini sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu PDPGR (Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong). Dalam Forum YASINAN, nilai gotong royong terintegrasi melalui kebersamaan warga dalam menyelenggarakan kegiatan, mulai dari persiapan tempat, penyediaan konsumsi, hingga pelaksanaan acara inti. Gotong royong dalam hal ini terwujud secara khas melalui budaya *Basiru* yang berasal dari Sumbawa. Budaya *Basiru* merupakan perwujudan dari nilai gotong royong yang diadopsi dalam Forum YASINAN dan menjadi salah satu kearifan lokal yang diangkat dalam forum tersebut. *Basiru* merupakan bentuk gotong royong khas Sumbawa yang menekankan pada aspek kebersamaan dan saling membantu dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dalam Forum YASINAN, budaya *Basiru* terwujud melalui kegiatan berbagi makanan tradisional seperti pisang, kacang rebus, ubi, dan jagung yang dibawa oleh para peserta. Praktik berbagi makanan ini menciptakan suasana keakraban dan menghilangkan sekat sosial antara masyarakat dan pemerintah. Nilai gotong royong dan budaya *Basiru* dalam Forum YASINAN merefleksikan dimensi solidaritas kelompok lokal, pengetahuan lokal, nilai lokal, dan sumber daya lokal dalam teori kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan strategi dan pandangan hidup yang didasarkan pada cita-cita kebaikan (Njatrijani, 2018). Gotong royong sebagai praktik umum di Indonesia dan *Basiru* sebagai manifestasi lokalnya dalam budaya Sumbawa telah berevolusi dari sekadar praktik saling membantu dan berbagi makanan. Perkembangan ini menghasilkan landasan operasional bagi pelayanan publik yang inklusif serta mekanisme untuk memfasilitasi pertemuan dan diskusi antara berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. Gotong royong dalam Forum YASINAN tidak hanya berhenti pada aspek fisik semata, tetapi juga menjangkau dimensi sosial yang lebih luas, yakni kebersamaan dalam menyelesaikan permasalahan publik.
2. Nilai Musyawarah Mufakat. Nilai musyawarah mufakat yang diungkapkan oleh informan merupakan pilar penting dalam Forum YASINAN. Musyawarah mufakat adalah sistem pengambilan keputusan yang mengutamakan diskusi dan konsensus, bukan voting atau keputusan mayoritas semata. Dalam Forum YASINAN, nilai ini menjadi landasan dalam proses penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. Musyawarah yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan Forum YASINAN memungkinkan terjadinya diskusi yang lebih transparan antara masyarakat dan pemerintah. Tidak adanya protokol formal yang kaku dan pengawalan ketat dari Satpol PP, menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya tanpa rasa takut atau intimidasi. Nilai musyawarah mufakat dalam Forum YASINAN merefleksikan dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal dan keterampilan lokal dalam teori kearifan lokal. Menurut Njatrijani (2018), kearifan lokal merupakan strategi hidup yang didasarkan pada cita-cita kebaikan. Dalam implementasinya, musyawarah mufakat telah diterapkan menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam skala kecil.
3. Nilai Silaturahmi. Nilai silaturahmi dalam Forum YASINAN, sebagaimana diungkapkan oleh informan menjadi elemen penting dalam membangun kedekatan antara masyarakat dan pemerintah. Silaturahmi tidak hanya dipahami sebagai pertemuan fisik semata, tetapi juga mencakup pembangunan ikatan emosional yang kuat antar individu atau kelompok. Dalam Forum YASINAN, nilai silaturahmi terwujud melalui pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap malam Jumat di kediaman Bupati Kabupaten Sumbawa Barat. Setting informal ini

memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih personal dan autentik antara masyarakat dan pemimpin daerah. Berdasarkan hasil penelitian, tampak bahwa Forum YASINAN telah berhasil membuka ruang akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan para pemimpin dan jajaran pemerintah daerah tanpa terhambat prosedur protokoler. Nilai silaturahmi dalam Forum YASINAN merefleksikan dimensi nilai lokal dan solidaritas kelompok lokal dalam teori kearifan lokal.

4. Nilai Kesetaraan dan Inklusivitas. Nilai kesetaraan dan inklusivitas dalam Forum YASINAN tercermin dari tidak adanya pembedaan status sosial antara pemerintah dan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh informan. Nilai ini menjadi pembeda utama Forum YASINAN dari forum-forum formal pemerintahan pada umumnya. Dalam Forum YASINAN, Bupati, pejabat pemerintah, dan masyarakat duduk bersama, berbagi makanan, dan berdialog tanpa sekat protokoler yang biasanya menciptakan jarak sosial. Inklusivitas dalam Forum YASINAN terlihat dari kemudahan akses yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Njatrijani (2018), kearifan lokal merupakan strategi hidup yang didasarkan pada cita-cita kebaikan. Dalam hal ini termanifestasi melalui nilai kesetaraan dan inklusivitas. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi nilai-nilai tersebut terlihat dari tidak diperlukannya pengisian buku tamu atau menunggu dalam antrean panjang untuk berpartisipasi dalam Forum YASINAN. Praktik ini telah membuka akses pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat dan merefleksikan dimensi nilai lokal serta solidaritas kelompok lokal sebagaimana dikonseptualisasikan dalam teori kearifan lokal.

Integrasi Nilai-Nilai Lokal dalam Forum YASINAN

1. Integrasi Nilai Gotong Royong dan Budaya Basiru. Nilai gotong royong diintegrasikan dalam Forum YASINAN sebagai elemen kearifan lokal yang menjadi landasan operasional forum ini. Pengintegrasian nilai ini sejalan dengan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam Forum YASINAN, gotong royong terwujud melalui kebersamaan warga dalam menyelenggarakan kegiatan, mulai dari persiapan tempat, penyediaan konsumsi, hingga pelaksanaan acara inti. Integrasi nilai gotong royong ini diwujudkan melalui budaya *Basiru*, yang merupakan budaya atau tradisi di Sumbawa yang di dalamnya mengandung aspek tolong menolong. Tradisi ini mengandung nilai-nilai luhur yang diteruskan dari generasi ke generasi yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih dijaga serta diandalkan oleh masyarakat Sumbawa Barat hingga kini. Dalam Forum YASINAN, salah satu integrasi budaya *Basiru* terwujud melalui kegiatan berbagi makanan tradisional seperti pisang, kacang rebus, ubi, dan jagung yang dibawa oleh para peserta, namun esensinya lebih luas mencakup kerja sama dan saling membantu dalam seluruh rangkaian kegiatan forum. Praktik ini menciptakan suasana keakraban dan menghilangkan sekat sosial antara masyarakat dan pemerintah.
2. Integrasi Nilai Musyawarah Mufakat. Nilai musyawarah mufakat diintegrasikan dalam Forum YASINAN sebagai sistem pengambilan keputusan yang mengutamakan diskusi dan kesepakatan bersama. Pengintegrasian nilai ini menjadi landasan dalam proses penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. Musyawarah dalam suasana kekeluargaan Forum YASINAN memungkinkan diskusi yang lebih transparan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam kerangka teori kearifan lokal, musyawarah mufakat merefleksikan dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal dan keterampilan lokal. Sebagaimana dijelaskan Njatrijani (2018), kearifan lokal merupakan strategi hidup yang didasarkan pada cita-cita kebaikan. Musyawarah mufakat dalam Forum YASINAN telah diterapkan menjadi proses demokratisasi dalam skala kecil, menunjukkan bagaimana dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal dapat diperbarui untuk memperkuat proses demokratisasi dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan.

3. Integrasi Nilai Silaturahmi. Nilai silaturahmi diintegrasikan dalam Forum YASINAN sebagai elemen penting untuk membangun kedekatan antara masyarakat dan pemerintah. Pengintegrasian nilai ini terwujud melalui pertemuan rutin setiap malam Jumat di kediaman Bupati. *Setting* informal ini memungkinkan interaksi yang lebih personal dan autentik antara masyarakat dan pemimpin daerah. Merujuk pada teori kearifan lokal, silaturahmi merefleksikan dimensi nilai lokal dan solidaritas kelompok lokal. Sejalan dengan pandangan Njatrijani (2018) tentang kearifan lokal sebagai pandangan hidup yang didasarkan pada cita-cita kebaikan, silaturahmi dalam Forum YASINAN telah dikontekstualisasikan menjadi mekanisme untuk membangun modal sosial berupa kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Pengintegrasian nilai silaturahmi menunjukkan bahwa dimensi nilai lokal dapat diaktualisasikan untuk memperkuat kepercayaan publik, yang merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif.
4. Integrasi Nilai Kesetaraan dan Inklusivitas. Nilai kesetaraan dan inklusivitas diintegrasikan dalam Forum YASINAN melalui penghapusan perbedaan status sosial antara pemerintah dan masyarakat. Pengintegrasian nilai ini menjadi pembeda utama Forum YASINAN dari forum-forum formal pemerintahan pada umumnya. Dalam Forum YASINAN, Bupati, pejabat pemerintah, dan masyarakat duduk bersama, berbagi makanan, dan berdialog tanpa sekat protokol. Dalam konteks teori kearifan lokal, kesetaraan dan inklusivitas merefleksikan dimensi nilai lokal dan solidaritas kelompok lokal. Hal ini sejalan dengan konsep Njatrijani (2018), dimana kesetaraan dan inklusivitas sebagai strategi hidup yang didasarkan pada cita-cita kebaikan telah diimplementasikan untuk mendemokratisasi pelayanan publik. Pengintegrasian nilai-nilai ini menunjukkan bahwa dimensi kearifan lokal dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi publik yang lebih luas dan substantif, sehingga menghasilkan mekanisme pelayanan yang lebih demokratis dan responsif.

Dampak Penerapan Forum YASINAN Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Dan Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Sumbawa Barat

Forum YASINAN adalah inovasi pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dibahas dua aspek penting dari implementasi Forum YASINAN, yaitu kontribusinya dalam penyelesaian permasalahan publik di Kabupaten Sumbawa Barat dan partisipasi masyarakat dalam forum tersebut. Kedua aspek ini menjadi indikator penting dalam mengetahui keberhasilan Forum YASINAN sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta perannya dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan visi strategis pemerintah.

Kontribusi Forum YASINAN Terhadap Penyelesaian Permasalahan Publik Di Kabupaten Sumbawa Barat

Forum YASINAN telah memberikan kontribusi yang efektif dalam penyelesaian permasalahan publik di Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan berbagai informan, dapat diidentifikasi beberapa bentuk kontribusi penting sebagai berikut:

1. Keselarasan dengan Visi Strategis Pemerintah. Forum YASINAN berperan sebagai katalis dalam mewujudkan KSB BAIK (Kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya yang selaras antar pembabngunan dunia dan akhiratnya) yang berlandaskan gotong royong. Forum ini sejalan dengan visi strategis keterbukaan pemerintah yang menciptakan nilai-

nilai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Keselarasan ini mendukung pencapaian Misi 3 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021-2026.

2. Dukungan Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Forum YASINAN mendukung pencapaian tujuan SDGs ke-16, khususnya target 16.6 yang berfokus pada pengembangan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua level. Hal ini menunjukkan bahwa forum lokal ini memiliki relevansi dengan agenda pembangunan internasional, menegaskan peran strategisnya dalam konteks yang lebih luas.
3. Penyelesaian Masalah Sektoral. Keberhasilan Forum YASINAN terlihat jelas dalam penyelesaian masalah sektoral, terutama di bidang kesehatan dan sanitasi. Melalui Forum YASINAN, terjadi percepatan penuntasan program sanitasi total berbasis masyarakat dengan lima pilar utama: Penghapusan praktik buang air besar sembarangan dalam waktu kurang dari 100 hari; Pembiasaan cuci tangan pakai sabun; Konsumsi air yang sudah direbus atau dikelola dengan baik; Pengelolaan sampah rumah tangga (mencapai 80%); Pengelolaan limbah cair rumah tangga. Implementasi kelima pilar ini berhasil menekan penyakit berbasis lingkungan dan menghemat anggaran daerah sebesar 11 hingga 12 miliar rupiah per tahun, sebagaimana diungkapkan oleh informan.
4. Penguatan Modal Sosial. Forum YASINAN berkontribusi pada penguatan modal sosial masyarakat melalui peningkatan nilai gotong royong. Berdasarkan penuturan informan, forum ini tidak hanya menyelesaikan masalah infrastruktur seperti jalan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial masyarakat melalui interaksi yang terjadi secara rutin. Secara khusus, kegiatan Forum YASINAN telah menciptakan ruang interaksi sosial yang berkelanjutan bagi warga Sumbawa Barat. Modal sosial adalah kumpulan nilai dan norma bersama yang memfasilitasi kerjasama dalam masyarakat. Zikrillah et al. (2021) menjelaskan bahwa modal sosial memiliki tiga dimensi penting: ikatan (*bonding*) yang menguatkan hubungan internal kelompok, jembatan (*bridging*) yang menghubungkan antar kelompok, dan jaringan (*linking*) yang menghubungkan masyarakat dengan institusi. Dalam Forum YASINAN, dimensi ikatan terlihat dari meningkatnya solidaritas antarwarga yang hadir, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya partisipasi dalam kegiatan gotong royong pasca pertemuan. Dimensi jembatan terwujud melalui pertemuan berbagai kelompok masyarakat dalam forum, yang memungkinkan pertukaran ide dan sumber daya lintas kelompok sosial. Sementara itu, dimensi jaringan tampak dari hubungan yang terbangun antara masyarakat dengan pemerintah daerah melalui kehadiran perwakilan pemerintah dalam beberapa pertemuan forum. Forum YASINAN menerapkan prinsip yang sejalan dengan temuan Hardiyanti & Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa modal sosial berperan penting dalam pembangunan karena mendorong partisipasi dan tindakan bersama. Hal ini terlihat dari bagaimana masyarakat secara bersama-sama mengidentifikasi permasalahan desa dan mencari solusi melalui Forum YASINAN.
5. Menjaga Stabilitas Sosial. Forum YASINAN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial karena memberikan wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini memungkinkan potensi konflik dapat diselesaikan sejak dini dan mengurangi demonstrasi atau "parlemen jalanan". Informan mengungkapkan bahwa terbukanya ruang dialog melalui Forum YASINAN telah membantu menghindari protes jalanan karena masyarakat memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan keluhan secara langsung.

Partisipasi Masyarakat dalam Forum YASINAN

Forum YASINAN telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait partisipasi masyarakat dalam Forum YASINAN:

1. Keterbukaan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memahami bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat terwujud tanpa adanya keterbukaan dari pihak pemerintah. Informan menekankan bahwa partisipasi masyarakat dan kerja kolaboratif lintas sektor sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah bersikap terbuka. Kesadaran ini menjadi landasan diciptakannya Forum YASINAN sebagai model yang menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
2. Integrasi Nilai Religius dengan Dialog Terbuka. Forum YASINAN memiliki keunikan karena mengintegrasikan kegiatan religius dengan dialog terbuka. Mekanisme partisipasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka. Kegiatan dimulai dengan kegiatan keagamaan berupa pembacaan yasin, ceramah, dan sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog dimana masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan harapan mereka secara langsung. Hal ini menciptakan suasana kekeluargaan dan kepercayaan yang kondusif untuk komunikasi dua arah. Disisi lain, yasinan merupakan ibadah yang dilakukan oleh masyarakat yang beragama islam, akan tetapi masyarakat yang tidak beragama islam tetap memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam Forum YASINAN. masyarakat yang tidak beragama islam diperbolehkan masuk pada saat sesi forum atau diskusi dimulai.
3. Peningkatan Kepercayaan Publik. Kecepatan respon dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap Forum YASINAN dan pemerintah daerah. Informan mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin meningkat karena transparansi dalam pembahasan dan penyelesaian masalah melalui forum.
4. Bentuk Partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam Forum YASINAN mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Informan menjelaskan bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan forum dengan menyampaikan apa yang mereka lihat dan rasakan di wilayahnya. Melalui kehadiran masyarakat dalam forum dan menyampaikan keluhan, harapan, serta kritikan, masyarakat telah berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
5. Peningkatan Partisipasi. Keberhasilan Forum YASINAN dalam menyelesaikan permasalahan publik telah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dari waktu ke waktu. Informan menjelaskan bahwa kehadiran masyarakat dalam forum semakin meningkat setiap minggunya seiring dengan bertambahnya bukti nyata dari aspirasi yang ditindaklanjuti dengan baik. Peningkatan partisipasi ini menunjukkan keberhasilan forum dalam mengubah sikap apatis masyarakat menjadi lebih aktif dalam proses pembangunan daerah.
6. Perubahan Sikap Masyarakat. Forum YASINAN telah berhasil mengubah sikap masyarakat yang sebelumnya cenderung apatis terhadap proses pemerintahan. Informan menekankan bahwa banyak warga yang sebelumnya pasif dalam kegiatan sosial kini justru aktif menyampaikan pendapat. Forum ini dinilai berhasil mengubah sikap masa bodoh masyarakat terhadap pemerintah menjadi sikap yang lebih partisipatif.

Forum YASINAN Sebagai Bentuk *Citizens' Charter*

Forum YASINAN dipilih sebagai bentuk *Citizens' Charter* dibandingkan bentuk inovasi pelayanan publik lainnya karena karakteristiknya yang sangat sesuai dengan prinsip "Kontrak Pelayanan" sebagaimana dijelaskan Setijaningrum (2009). *Citizens' Charter* menempatkan pengguna layanan (masyarakat) di pusat perhatian, berbeda dengan inovasi lain seperti *Reinventing Government* yang lebih berfokus pada efisiensi organisasi, *Total Quality Management* yang berorientasi pada kepuasan pelanggan secara umum, *Balance Scorecard*

yang menekankan pengukuran kinerja, atau *Six Sigma* yang berfokus pada pengurangan kesalahan dalam proses. Hasil penelitian menunjukkan Forum YASINAN telah memenuhi unsur-unsur dasar *Citizens' Charter*, yaitu memiliki visi dan misi pelayanan yang jelas (selaras dengan visi KSB BAIK) dan standar pelayanan yang disepakati bersama (seperti responsivitas terhadap keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan cepat. Sebagaimana diungkapkan Pananrangi (2019), *Citizens' Charter* mendorong penyedia layanan untuk berkolaborasi dengan pengguna layanan dalam menyepakati prosedur, waktu, biaya, dan cara pelayanan, yang tercermin dalam mekanisme dialog terbuka Forum YASINAN. Di tengah kenyataan bahwa "masyarakat masih banyak yang belum dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik secara umum", Forum YASINAN justru berhasil melibatkan masyarakat tidak hanya sebagai pengguna jasa, tetapi juga dalam kerangka kewarganegaraan (*citizenship*) dengan peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Bukti keberhasilan ini terlihat dari penghematan anggaran 11-12 miliar rupiah per tahun pada program sanitasi dan transformasi sikap masyarakat dari apatis menjadi aktif, mengkonfirmasi apa yang dijelaskan Maani (2010) sebagai wujud konkret dari pelayanan publik yang berfokus pada warga negara, dengan ide dasar *good governance*, kewarganegaraan demokratis, dan partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Forum YASINAN (Pelayanan Setara Inklusif Andalan) Sebagai Model Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Sumbawa Barat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Forum YASINAN terbentuk sebagai respons terhadap berbagai permasalahan dalam pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa Barat. Proses ini melibatkan analisis terhadap masalah-masalah pelayanan, strategi inovasi, dan karakteristik inovasi pelayanan publik yang berfokus pada partisipasi masyarakat. Forum YASINAN berhasil mengubah pendekatan birokrasi yang formal menjadi lebih inklusif dan berbasis nilai lokal, sehingga menciptakan ruang dialog yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.
2. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Forum YASINAN mencakup gotong royong, budaya *Basiru*, musyawarah mufakat, silaturahmi, dan kesetaraan. Integrasi nilai-nilai ini ke dalam pelayanan publik menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun sistem pelayanan yang lebih responsif dan akuntabel. Forum YASINAN berhasil mengadopsi dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut untuk menciptakan model pelayanan publik yang berakar pada kearifan lokal masyarakat Sumbawa Barat.
3. Penerapan Forum YASINAN memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. Forum YASINAN berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan publik, memperkuat modal sosial, dan menjaga stabilitas sosial. Selain itu, partisipasi masyarakat meningkat secara signifikan, baik dalam hal keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program-program pembangunan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Forum YASINAN mampu mengubah sikap apatis masyarakat menjadi lebih aktif dan partisipatif.
4. Forum YASINAN dapat dikonseptualisasikan sebagai manifestasi *Citizens' Charter* yang menempatkan pengguna layanan sebagai fokus utama. Melalui mekanisme dialog terbuka dan konsensus bersama terkait standar pelayanan, forum ini menciptakan ruang partisipasi aktif bagi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi pelayanan publik. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip *good governance* serta berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Saran

1. Bagi Masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat terus aktif berpartisipasi dalam Forum YASINAN dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyampaikan aspirasi serta keluhan. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga. Selain itu, masyarakat disarankan untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang telah terintegrasi dalam forum ini, sehingga keberlanjutan dan efektivitas Forum YASINAN dapat terjaga.
2. Bagi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat disarankan untuk terus mendukung dan mengembangkan Forum YASINAN sebagai model inovasi pelayanan publik. Peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi penyelenggara forum perlu dilakukan agar mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan komunikasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan untuk lebih memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Forum YASINAN dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Model ini juga memiliki potensi untuk direplikasi di daerah lain sebagai contoh inovasi pelayanan publik berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, D. (2019). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, 1(1), 1–8. sumber: <http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis>.
- Apriyanto, S. D., Fitriaty, & Indrawijaya, S. (2023). Model Reinventing Government Menuju Pemerintahan yang Baik: Good Government Governance. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 1246. doi: <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1115>.
- Ariyani, A., Mendiarti, L. I., & Nuh, M. (2016). Inovasi Pelayanan Publik: Studi pada Pelayanan Kesehatan Melalui Program Gerbrakan Suami Siaga di Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(4), 156–161. sumber: <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap>.
- Azizah, R. (2009). Implementasi Pengukuran Kinerja Sektor Publik dengan Sistem Balanced Scorecard : Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Madiun. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang). sumber: <http://etheses.uin-malang.ac.id/44612/1/05610050.pdf>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat. (2024). Indikator Kesejahteraan Rakyat: Kabupaten Sumbawa Barat. Sumbawa Barat: Penulis.
- Badan Riset dan Inovasi Daerah. (t.t.). Komitmen OGP Open Government Partnership : OGP Local Kabupaten Sumbawa Barat. Sumbawa Barat: penulis.
- Dorongsihae, V., Sambiran, S., & Pangemanan, F. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Kearifan Lokal Di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 2(1), 3.
- Fadli, M. R., (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika*, 21(1), 33–54. doi: <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fahriza, & Pertama. (2021, December 17). ANTARA/HO-Humas PEMKAB Sumbawa Barat. Forum Yasinan Kabupaten Sumbawa Barat Juara OGP Korea. <https://www.antaranews.com/berita/2590873/forum-yasinan-sumbawa-barat-raih-juara-1-ogp-di-korea>.
- Fatimahsyam. (2023). Desa Tangguh Bencana di Lereng Merapi: Kearifan Lokal dan Modal Sosial Masyarakat Glagaharjo. *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 146–154. <https://doi.org/10.22373/sinthop.v2i2.4165>

- Finanda, A. S., Fadhila, J. F., & Hayat. (2024). Implementasi Prinsip Prinsip Pelayanan Publik: Public Inspiration. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 74–78. doi: <https://doi.org/10.22225/pi.9.1.2024.74-78>
- Gonda, M. S., Bahfiarti, T., & Farid, M. (2023). Implementasi Komunikasi Organisasi Berbasis Kearifan Lokal Dalam Pelayanan Publik. *Eksprei dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(03), 518-534. doi: <https://doi.org/10.33822/jep.v6i3.6391>.
- Handayani, R. (2020). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Hardani (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hardiyanti, N. T. & Rahmawati, F. Peran Modal Sosial dalam Pengembangan Usaha Sentra Kampoeng Batik Jetid Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 5(2).
- Husain. (2019). *Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal*. Makassar: Syakir Media Press.
- Kriswahyu, H., Zayyad, I. F., Wibowo, M. A., Renaldo, H., R, Diani. I., Fajarwati, I. (2017). *Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun 2009: Survei Ombudsman RI*. Kuningan, Jakarta Selatan: Ombudsman Republik Indonesia.
- Lawongo, V. E., Lumolos, J., & Sumampouw, I. (2017). Perilaku Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Moronge Selatan II Kabupaten Talaud. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2.
- Lukman, S., Suwanda, D., & Santoso, Y. P. (2021). *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. Bandung: Rosda Press.
- Maani, K. Dt. (2010). Citizen Charter : Terobosan Baru dalam Penyelenggaraan Layanan Publik. *Jurnal Tingkap*, VI(2), 35–52.
- Mahpudin. (2022). Inovasi Pelayanan Publik: Pengalaman dari Kota Cilegon, Indonesia. *Jurnal Mantra Pembaruan*, 6(2), 107–117. doi: <https://doi.org/10.21787/mp.6.2.2022.107-117>
- Maradjabessy, M. F., Lasut, J. J., & Lumintang, J. (2019). Interaksi Sosial Forum Mahasiswa Kota Tidore Kepulauan di Kota Manado. *Jurnal Holistik*, 12(1), 1–19. sumber: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/article/view/24576>.
- Moleong, L.J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- Moleong, L.J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda.
- Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: Yogya Press.
- Mustofa, S., Halikin, Akhairuddin. (2020). *Pembangunan Daerah Berbasis Gotong Royong di Indonesia*. Sumbawa Barat: Guepedia.
- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Jurnal Gema Keadilan*, 5(1), 16–31.
- Pananrangi. (2019). Inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Citizen's Charter. *Meraja Journal*, 2(2), 119–134.
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. (2016). *Buku Paduan Kegiatan PDPGR*. Taliwang, Sumbawa Barat: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
-

- Prameswara, D. A., Mustafid, & Prahutama, A. (2014). Metode Servqual-Six Sigma untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Studi Kasus di Kantor Kecamatan Kedungbanteng, Purwokerto. *Jurnal Gaussian*, 3(4). doi: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian>
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. doi: <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sartini, Artawa, & Sukiada. (2018). Menguak Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Wacana Ritual Pertanian Masyarakat Bali : Kajian Etnolinguistik. (Laporan Penelitian Dasar Unggulan Pergaulan Tinggi, Universitas Airlangga). sumber:<https://bpsdm.kemendagri.go.id/Assets/Uploads/laporan/389e3ab07d65d9eb a12c13913e4cdf2a.pdf>
- Setijaningrum, E. (2009). Inovasi Pelayanan Publik. Surabaya: PT. Medika Aksara Globalindo.
- Suandi. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, 1(2), 13–22. doi: <https://doi.org/10.48093/jiask.v1i2.8>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : CV.Alfabeta
- Sumanda, I. M. (2017). Peranan Kearifan Lokal Bali Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 7(1), 117-126.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (PPLH).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Wahyudi, J. (2024). Democratic Innovation from West Sumbawa Regency, Indonesia: Analysis of Forum YASINAN as an Instrument of Community Participation in Development. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(03), 242-256. doi: <https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i3.18570>
- Wandi, S., Nurharsono, T., & Raharjo, A. (2013). Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di Sma Karangturi Kota Semarang. *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations*, 2(8), 524–535. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/peshr>
- Widiyanto, D., Prananda, A. R., Novitasari, Syahroni, M., & Mujtahidah, T. (2024). Kearifan Lokal dan Pancasila Strategi Penguatan Nilai Kebangsaan dalam Pendidikan. Magelang: PT. Cakrawala Candradimuka Literasi.
- Zaini, Z., Efendi, & Tuswoyo. (2023). Pengaruh Efektifitas Penerapan Sistem Perizinan Online, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komunikasi Organisasi Terhadap Kualitas Perizinan Pada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(2).
- Zikrillah, M., Afriana, F., Putri, R., & Yunus, S. Modal Sosial Perempuan dalam Menjaga Kelestarian Hutan. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4(1)